

BAB IV

UPAYA IOM DALAM MENANGANI

PERMASALAHAN HUMAN TRAFFICKING DI

INDONESIA DALAM INDUSTRI

PENANGKAPAN IKAN

Bab IV berisi tentang analisa terhadap upaya-paya IOM dalam menangani isu *human trafficking* terutama dalam industri penangkapan ikan di Indonesia.

International Organization for Migration merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi dan segala permasalahan yang terkait dengan migrasi. Sebagai Organisasi Internasional, IOM memiliki beberapa fungsi dalam menangani permasalahan yang terkait dengan migrasi, salah satunya ialah permasalahan human trafficking. Seperti pendapat Karen Mingst , ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi Internasional baik ditingkat Internasional, Negara maupun individu,namun disini penulis akan menjabarkan fungsi IOM hanya pada tingkat Internasional. Terutama dalam upaya IOM menyelesaikan permasalahan Human trafficking di Indonesia. IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi dan human trafficking, mempunyai tugas sesuai misi dan fungsinya yaitu antara lain :

A. Kerjasama Penelitian oleh IOM dan Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual. Perdagangan orang menuju dalam

negeri juga semakin menjadi isu serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikanan. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional, untuk memberantas salah satu ancaman serius atas keamanan manusia ini dan IOM Indonesia telah menjadi salah satu aktor dan mitra kunci pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia (IOM Indonesia).

Sejak tahun 2005, usaha melawan perdagangan manusia IOM Indonesia berfokus secara strategis pada; Pencegahan perdagangan orang melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja, perlindungan korban perdagangan orang melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, penguatan sistem peradilan Indonesia dengan peningkatan hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban, dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan orang di tingkat nasional dan sub-nasional..

Serta bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengadakan penelitian dan menyebarkan informasi mengenai human trafficking di Indonesia sebagai upaya IOM dalam menjalankan fungsi memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor, informasi dan pengawasan sebagai Organisasi Internasional. Menanggapi masih terjadinya penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kerja paksa masih berlangsung di abad ke 21 ini IOM Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai wakil pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir melakukan kerjasama untuk peningkatan kesadaran, pengembangan kapasitas di Indonesia, kontribusi juga pada

peningkatan pemahaman bersama tentang keamanan maritime melalui lensa keamanan manusia, serta menyebarkan hasil penelitian yang dapat mendukung upaya bersama ini untuk melawan human trafficking. Hal ini, dilakukan agar masyarakat awam Indonesia lebih mengetahui informasi tentang permasalahan human trafficking sehingga tidak mudah terseret atau terjebak dalam kasus tersebut.

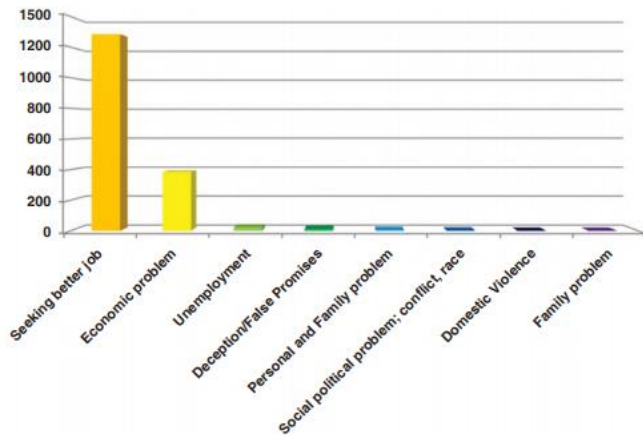
Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan human trafficking IOM melakukan penelitian terhadap nelayan dan awak kapal, baik yang berkebangsaan asing maupun Indonesia, yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia dan menerima bantuan IOM. Penelitian tersebut didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satuan Tugas Kepresidenan dalam memerang penangkapan ikan secara ilegal.

IOM Indonesia melakukan Penelitian tentang perdagangan manusia dalam industri perikanan di Indonesia menggunakan 3 sumber utama, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 1.342 orang nelayan yang berhasil diselamatkan dari Bejina dan Ambon pada tahun 2015, lalu untuk dapat menganalisis karakteristik beberapa korban, IOM juga memberikan kuedioner kepada 285 orang nelayan asing, selain itu wawancara dilakakun juga terhadap 283 orang nelayan dan awak kapal asal Indonesia yang sudah dipulangkan (KKP, 2015).

Dari hasil penelitian ditemukan banyak alasan yang mendorong para korban asing perdagangan manusia untuk meninggalkan negara asal mereka. Data tersebut di kumpulkan oleh IOM Indonesia selama wawancara dengan para korban perdagangan manusia asal Kamboja, Myanmar, dan Republik Demokratik Laos (1718 individu) di Indonesia. Alasan utama migrasi dalam 74,8% kasus adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik Alasan kedua migrasi dalam 22,4% kasus adalah permasalahan ekonomi. Para

korban diasumsi kan memiliki kesulitan ekonomi dalam keluarga mereka dan karena situasi tersebut mereka terdorong untuk meninggalkan Myanmar untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi guna menyokong keluarga mereka di Negara asal (KKP, 2015).

Grafik 4.5 Alasan untuk Meninggalkan Negara Asal (Migrasi)



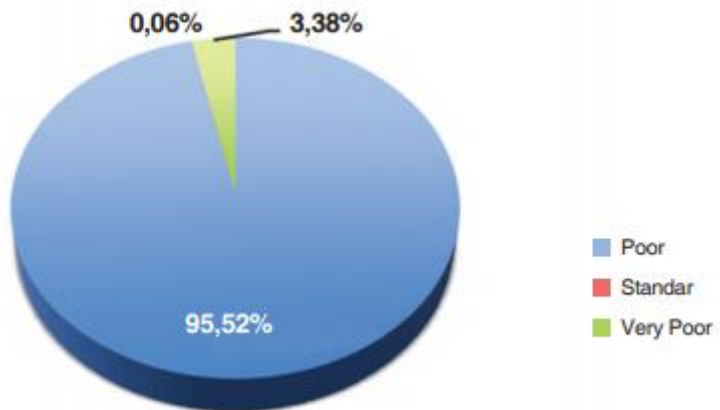
Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia (2015)

Sebagian besar korban yang masuk dalam kategori ini adalah kepala keluarga (menikah) atau tulang punggung dalam keluarga mereka (tidak menikah). Banyak responden yang diwawancarai oleh IOM Indonesia memiliki harapan yang sama yaitu tingkat upah yang tinggi dibandingkan dengan tingkat upah di negara mereka masing-masing. Dengan demikian, anak-anak muda yang tidak berpendidikan terdorong untuk bekerja di Thailand untuk meringankan beban finansial keluarga mereka. Maka tidak mengejutkan bahwa ketika para perekrut datang ke desa-desa mereka dengan

tawaran pekerjaan yang menggiurkan, para penduduk desa akan menerima tawaran tersebut (KKP, 2015).

Grafik selanjutnya menunjukkan kondisi ekonomi para korban asing sebelum diperdagangkan ke dalam industri penangkapan ikan di Indonesia. Hampir semua korban menganggap diri mereka “miskin” (95,52%) disusul oleh sejumlah kecil korban yang menganggap diri mereka sangat miskin pada saat mereka diperdagangkan. Kemiskinan merupakan faktor penting dalam kerentanan individu terhadap perdagangan manusia karena membatasi harapan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik (KKP, 2015).

Grafik 4.6 Status Ekonomi Korban Asing Perdagangan Manusia di Indonesia 2011-2015

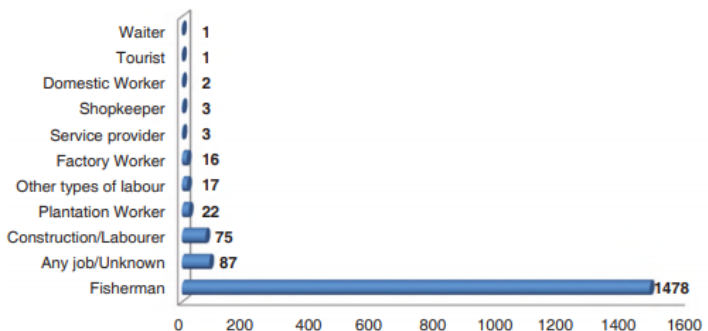


Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia (2015)

Data yang dikumpulkan oleh IOM Indonesia melalui wawancara-wawancara dengan semua korban asing perdagangan manusia dalam industri penangkapan ikan di

Indonesia tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa sebagian besar korban telah mendapatkan informasi tentang jenis pekerjaan yang akan perekrut berikan kepada mereka. Para korban dijanjikan beragam pekerjaan (Grafik 4.7) oleh para agen di awal proses perekrutan (KKP, 2017). Sebagian besar dari mereka yang bekerja dalam industri penangkapan ikan (86%), merasa bahwa pekerjaan yang dijanjikan kepada mereka di awal serupa dengan pekerjaan yang mereka peroleh pada kenyataannya. Hanya sebagian kecil dari para korban yang menganggap diri mereka dibohongi karena perbedaan jenis pekerjaan antara yang dijanjikan dan yang sebenarnya. Di antara mereka yang menganggap diri mereka menjadi korban penipuan saat perekrutan, lebih dari setengahnya tidak menerima informasi yang jelas tentang jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan (KKP, 2015).

Grafik 4.7 Pekerjaan yang Dijanjikan



Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia (2015)

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para korban, digunakan untuk mengidentifikasi apakah para korban tersebut telah diperdagangkan sesuai dengan definisi yang ada dalam protocol Palermo, dan juga untuk mengetahui kebutuhan perlindungan seperti apa yang diperlukan bagi para korban trafficking. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui dan

menyimpan data tentang latar belakang korban, proses perekrutan korban, pengalaman korban selama menjadi korban perdagangan, pengalaman proses pemulangan para korban ke daerah asalnya masing-masing, serta kebutuhan apa saja yang dipenuhi oleh para korban selama mereka menjadi korban perdagangan. Data ini memungkinkan akan didokumentasikan secara detail guna menambah kedalaman informasi yang dikumpulkan. Dapat dikatakan IOM tidak bekerja sendiri, namun IOM juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dari pemerintah atau non-pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat dilengkapi dengan data kualitatif dari wawancara dengan korban.

Dengan data yang diperoleh serta dikumpulkan itu, kemudian data tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dasar untuk program kerja IOM guna menangani permasalahan human trafficking di Indonesia. Dan berhubung data didapatkan langsung dari wawancara para korban human trafficking, maka IOM dapat menentukan langkah operasional yang dianggap tepat untuk menangani permasalahan human trafficking di Indonesia. Lalu hasil wawancara ini juga kemudian dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat disebarkan kepada masyarakat Indonesia yang awam terhadap human trafficking. Informasi ini juga dapat diberikan khususnya kepada para migran sebagai bentuk pembekalan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang human trafficking sehingga dapat menghindari jebakan yang dibuat oleh para agen migrasi illegal. Di sisi lain Penelitian ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang industri kriminal yang memiliki jangkauan luas dan akar yang kuat, yang beroperasi berdampingan dengan industri perikanan yang sah, dan sering saling tumpang tindih. Situasi semacam ini menunjukkan ketersebaran kejahatan transnasional terorganisir di laut dan ancaman yang ditimbulkan pada keamanan maritim negara, dan ancaman keamanan manusia terhadap para nelayan, pelaut dan masyarakat komunitas nelayan (KKP, 2015).

Lalu penyediaan data dan informasi yang diberikan oleh IOM, maka hal tersebut menunjukkan bahwa IOM sebagai Organisasi International telah melaksanakan fungsi memberikan kontribusi untuk bekerja sama antar Negara / aktor guna menyediakan informasi, IOM lebih menekankan pada aspek pencegahan dan pemberian bantuan secara teknis bagi para korban human trafficking. Oleh karena itu, dalam fungsi tersebut IOM dapat membantu pemerintah Indonesia guna memberikan pengetahuan mengenai human trafficking bagi masyarakat Indonesia.

Fungsi IOM untuk memberikan kontribusi terciptanya suasana kerjasama antara Negara/aktor atau bisa juga disebut menyediakan arena untuk bargaining bagi Negara-negara untuk menyelesaikan masalah, khususnya masalah Human trafficking ialah dengan cara bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Australia serta beberapa organisasi international lainnya mencetuskan sebuah forum yang membahas Kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan orang merupakan permasalahan regional yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak di kawasan, khususnya negara asal, negara transit dan negara tujuan, termasuk kerjasama erat dengan lembaga internasional yang terkait.

Pada febuari 2002 dicetuskan forum Bali Process. Pada awalnya, agenda dalam Bali Process sangat terfokus kepada aspek-aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan negara anggota serta kapasitas kontrol negara, termasuk didalamnya memperkuat penegakkan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen; pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagi pengetahuan. Saat itu IOM memfasilitasi Konferensi Tingkat Menteri Regional tentang penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan trans-nasional lainnya di Bali. Konferensi Bali Process ini bertujuan untuk

mengembangkan kapasitas nasional dan regional dalam rangka menangani isu-isu perdagangan dan penyelundupan manusia.

B. Pelatihan Kepada Polisi Oleh IOM

Menurut Karen Mungst, organisasi internasional pada tingkat internasional memiliki enam fungsi, seperti yang disebutkan pada bab satu, salah satunya ialah fungsi menyediakan informasi dan pengawasan, namun IOM tidak menjalankan pengawasan karena IOM pada dasarnya merupakan organisasi yang tidak memiliki mandat anti-trafficking yang formal, mandat utama IOM adalah membantu memastikan pengelolaan migrasi secara tertib dan manusiawi bagi para migran serta tidak merugikan bagi Negara pengirim atau Negara penerima migran, serta untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang menjadi korban dari migrasi ilegal atau bisa juga disebut korban human trafficking. Mandat IOM sendiri, tidak memiliki tanggung jawab untuk pengawasan yang terkait memerangi human trafficking seperti konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional tentang perdagangan anak dan Protokol Palermo. IOM juga tidak memiliki akses untuk melaksanakan pengawasan pasalnya IOM itu bukanlah badan penanganan keamanan seperti FBI. Fokusnya hanya pada pencegahan perdagangan manusia dan penanganan korban serta membantu para korban mendapatkan hak asasinya.

Namun bukan berarti bahwa IOM kemudian lepas tangan terhadap pengawasan human trafficking yang ada di Indonesia. IOM bekerjasama dengan kepolisian Indonesia guna membangun kapasitas dalam penanganan kasus human trafficking di Indonesia dan juga menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan tersebut. Pada 23 September 2014 lalu IOM Indonesia menandatangani kesepakatan penting tentang pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yang merupakan lembaga kepolisian terbesar ketiga di dunia. Penandatanganan kesepakatan ini memperkuat hubungan yang sudah erat dan produktif - sejak tahun 2003, IOM telah melatih sekitar 111,000 perwira polisi dalam bidang polisi masyarakat, hak asasi manusia dan kesetaraan gender, selain juga melatih

lebih dari 7000 perwira dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Tidak hanya itu, 8,200 perwira polisi (1,200 diantaranya adalah polisi wanita) dilatih untuk bekerja di garda depan dalam pemberantasan penyelundupan, bersama dengan migran korban penyelundupan dan organisasi-organisasi anti-penyelundupan (IOM Indonesia, 2014)

Sebelumnya pada tanggal 4 Juli 2014, IOM Indonesia terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan satu-hari tentang Pengantar Pidana Penyelundupan Manusia dan Kejahatan Transnasional Lainnya untuk perwira polisi senior yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti Polri). Ini adalah pelatihan kedua bagi peserta Sespimti yang diadakan oleh IOM, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2013 yang lalu. Sespimti adalah bagian dari Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol), dan merupakan jalur pendidikan utama yang perlu dilalui oleh perwira polisi sebelum diangkat menjadi Jenderal Polisi. Pelatihan dalam Sespimti hanya bisa diikuti oleh perwira tinggi polisi dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes). Dan yang bertindak sebagai instruktur dari IOM adalah ibu Gaut Pangasih, Nurul Qoriah dan Nabel Hayaze - dengan topik meliputi: penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan polisi masyarakat. Selain berkontribusi pada kurikulum Sespimti, IOM Indonesia juga secara rutin memberikan pelatihan bagi sejumlah institusi pendidikan Polri lainnya, seperti: (a) Pusat Pendidikan Reserse Kriminal; (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen Polri), (c) Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setupka Polri); dan (d) Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) (IOM Indonesia, 2014).

Pada tahun 2016 lalu, Kapolri mendukung usaha IOM Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 7,000 Polwan. Pelatihan tersebut merupakan wujud nyata kerjasama Polri dan IOM yang akan memberikan pembelajaran yang berdampak pada pemahaman, wawsan dan ketrampilan bagi para peserta dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah

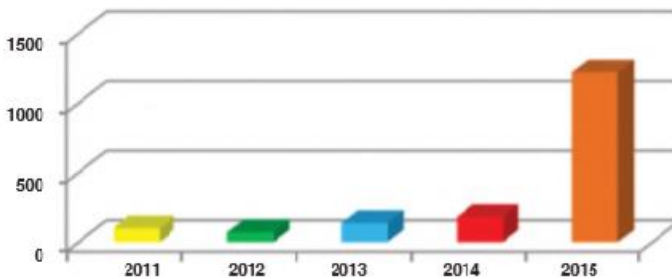
kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, perdagangan orang dan penyeludupan manusia. IOM telah menyelenggarakan pelatihan tentang hak asasi manusia dan pemolisian masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Fase baru yang berlangsung selama dua tahun ini akan memberikan pelatihan bagi 3,173 polwan di 32 propinsi mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, perdagangan orang, juga pemolisian yang proaktif dan preventif. Komponen komunikasi sosial yang bermanfaat bagi para petugas untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan aparat termasuk dalam fase terakhir dari pelatihan itu (IOM Indonesia, 2016).

Dengan program IOM yang bekerjasama dengan kepolisian Indonesia maka meskipun IOM tidak menjalankan fungsi pengawas sebagai organisasi internasional namun IOM memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada aparat keamanan Negara dalam peningkatan kesadaran dan penanganan terkait permasalahan human trafficking. Dan juga membantu mengupayakan untuk membantu pemerintah Indonesia menjalankan peraturan terkait human trafficking di negaranya.

C. Pemberian bantuan teknis kepada para korban Human Trafficking

IOM sebagai organisasi internasional menangani permasalahan human trafficking ini lebih banyak menjalankan fungsinya pada bantuan-bantuan operasional yang tentu bersifat teknis. Jumlah nelayan yang menjadi korban perdagangan manusia yang dibantu oleh IOM Indonesia tetap stabil dari tahun 2011 sampai dengan 2014, berkisar 124 korban per tahun. Pada tahun 2015, jumlah tersebut tiba-tiba meledak menjadi 1222 . Peningkatan yang tiba-tiba dalam jumlah korban penerima bantuan disebabkan oleh terbitnya artikel liputan investigatif yang dilakukan oleh Associated Press. Berita bertajuk “Slaves may have caught the fish you

bought” (menjadi pemberitaan global. Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengambil tindakan cepat untuk menanggapi situasi tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia, IOM berupaya untuk mengidentifikasi ribuan korban perdagangan manusia di Benjina dan Ambon dan memulangkan mereka kembali ke negara asal mereka (KKP, *Grafik 4.8 Tren Nelayan Asing yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia yang dibantu oleh IOM (2011-2015)*)



2015).

IOM Indonesia telah menerima rujukan dan memberikan bantuan bagi para nelayan yang diperdagangkan, yang terdampar di perairan Indonesia sejak tahun 2005 melalui Unit Anti Perdagangan Manusia IOM (IOM-CounterTrafficking Unit). Secara keseluruhan, 2.001 nelayan telah mendapatkan bantuan dari IOM Indonesia. Diantara para korban tersebut, 283 di antaranya berkebangsaan Indonesia dan 1718 berkebangsaan asing (KKP, 2015).

Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia (2015)

Di tahun 2011-2015 jumlah kasus perdagangan manusia yang melibatkan para nelayan, sebageaian besar bukan berkebangsaan Indonesia namun asing, terus bertambah. Dan yang terbesar adalah pada tahun 2015. Para korban dirujuk ke

IOM Indonesia, sejak saat itu IOM Indonesia bersama kementerian KKP bergerak membantu para nelayan korban perdagangan manusia.

Pada tahun 2015 saja, IOM Indonesia mengidentifikasi dan membantu sebanyak 1.342 nelayan, 77% di antaranya berkebangsaan Myanmar, 10% berkebangsaan Kamboja, 11% berkebangsaan Thailand dan 1 % berkebangsaan Laos. Para nelayan ini terdampar di sembilan wilayah di seluruh Indonesia ,lihat table 1 (KKP, 2015).

Tabel 4.1 Para Nelayan Asing yang Mendapatkan Bantuan dari Tanggal 7 April 2015 sampai dengan 31 Januari 2016

No	Location	Nationalities				Screened Fishermen	Returned Fishermen	Fishermen Who Passed Away	Remaining Fishermen
		MM	KH	LO	TH				
1	Ambon	383*	3	6	80	472	421	2	49
2	Tarempa	44	33	0	30	107	105	0	2
3	Belawan	23	0	0	0	23	21	0	2**
4	Pontianak	35	2	0	0	37	36	0	1
5	Tanjung Balai	4	0	0	0	4	4	0	0
6	Tanjung Pinang	38	3	0	0	41	29	0	12
7	Benjina	508	96	8	42	656	654	0	2***
8	Kupang	2	0	0	0	2	2	0	0
9	Bau Bau****	1*****	0	0	0	1*****	1*****	0	0
	Total	1037	137	14	152	1342	1272	2	68

* 383 Myanmar nationals including 2 Myanmar national referred from Benjina Case.

** 2 remain fishermen in Belawan, one run away from Belawan Immigration and one refused to return and has been referred to UNHCR for asylum seeker.

*** 2 remain fishermen in Benjina refused to return home and went missing

**** Upon an in-depth interview, the fisherman who was originally from the Ambon case, in this regard the number is not counted

Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia (2015)

Dalam kerjasamanya dengan beberapa pemangku kepentingan, IOM Indonesia memberikan berbagai bantuan kepada para nelayan yang menjadi korban human trafficking yaitu bantuan penampungan, pemulangan, logistic perawatan kesehatan dan juga hukum. antara lain sebagai berikut (KKP, 2015);

1. Bantuan Pemulangan ke Negara-negara Asal Bagi Para Korban

IOM Indonesia telah memfasilitasi pemulangan sejumlah 1.648 nelayan asing ke negara-negara asal mereka sampai dengan 31 Januari 2016. Puluhan nelayan tetap tinggal di Indonesia pada tahun 2016, dan dua orang nelayan berkebangsaan Myanmar meninggal dunia. Bantuan pemulangan diberikan melalui koordinasi antara Misi IOM di negara asal, Kedutaan-Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Kedutaan-Kedutaan Besar mengeluarkan Surat Identitas atau Dokumen Perjalanan untuk setiap nelayan untuk membantu kantor imigrasi di Indonesia mengeluarkan dokumen resmi untuk meninggalkan Indonesia. Misi IOM di negara asal nelayan berkoordinasi erat dengan pemerintah di negara asal untuk memberi bantuan di bandara udara, pengaturan transportasi selanjutnya ke desa-desa asal para nelayan, serta memberikan bantuan reintegrasi bagi mereka yang membutuhkan.

2. Bantuan Makanan dan non Makanan

IOM memberikan bantuan non-makanan kepada para korban termasuk perlengkapan kebersihan (perlengkapan kebersihan pribadi untuk sebulan) dan pakaian yang diberikan kepada 392 nelayan di Ambon. Bantuan ini diberikan secara bulanan. Selama jangka waktu bantuan, IOM memberikan bantuan makanan kepada 978 nelayan dan non-makanan kepada 1050 nelayan yang terdampar di Benjina dan Ambon. Tabel 6 memberikan informasi rinci tentang distribusi

makanan dan non- makanan kepada para nelayan dan awak kapal.

3. Bantuan Kesehatan

IOM Indonesia terus memberikan bantuan perawatan kesehatan kepada para nelayan yang membutuhkan. Para nelayan menerima bantuan perawatan kesehatan, dan satu nelayan menerima perawatan rawat inap. Beberapa nelayan juga menerima perawatan kesehatan tambahan, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negaranegara asal.

Seluruhnya ada 994 nelayan yang menerima bantuan perawatan kesehatan dari IOM, dengan 658 di antaranya ialah para nelayan di Benjina dan 336 di antaranya adalah para nelayan di Ambon. Dari 994 nelayan, 843 di antaranya berkebangsaan Myanmar, 96 berkebangsaan Kamboja, 42 berkebangsaan Thailand, dan 13 berkebangsaan Laos. Di samping itu, dari 994 nelayan yang menerima perawatan kesehatan; 18 di antaranya juga menerima perawatan rawat inap. Perawatan rawat inap diberikan kepada 2 persen nelayan yang mengalami beragam kondisi termasuk nyeri otot, tipus, gastritis dan patah tulang. Salah seorang nelayan juga menerima perawatan kesehatan intensif dan membutuhkan evakuasi ke Makassar karena penyakit komplikasi.

4. Bantuan Penampungan

Penampungan sementara disediakan bagi para nelayan di Ambon. Dalam menyediakan penampungan sementara, IOM bekerja erat dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara keseluruhan 978 nelayan dari kasus Benjina dan Ambon mendapatkan bantuan fasilitas-fasilitas penampungan sementara, dengan 826 di antaranya berkebangsaan Myanmar, 96 berkebangsaan Kamboja, 42 berkebangsaan Thailand, dan 14 berkebangsaan Laos.

5. Bantuan Reintegrasi

Bantuan IOM kepada para korban tidak berhenti setelah mereka dipulangkan. Setelah mereka kembali ke negara asal mereka, IOM Kamboja membantu 84 nelayan asal Kamboja dengan bantuan penghidupan. 41 di antaranya dibantu untuk beternak, 18 untuk memelihara babi, 7 untuk membeli motor untuk menjadi pengemudi taksi motor, dan 6 dibantu untuk membuka warung bahan makanan tradisional. Di samping itu, 5 orang nelayan memutuskan untuk mengambil kursus pelatihan keterampilan seperti kursus menyetir dan kursus montir.

6. Bantuan Hukum

Kasus Benjina diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri Kepulauan Aru di Tual. Polri bekerja erat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kejaksaan Agung untuk menuntut para tersangka dari perusahaan PT. Pusaka Benjina Resource (PBR). Kasus-kasus perdagangan manusia di Benjina dan Ambon diadili di pengadilan dengan putusan dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2016. Pengadilan Negeri Tual memutuskan 8 orang terdakwa bersalah atas perdagangan manusia di Benjina dengan masing-masing pelaku dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp. 160 juta atau menjalani tambahan enam bulan penjara. Lima orang terdakwa yang adalah para kapten harus membayar total Rp. 773.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi bagi para anggota awak kapal mereka yang telah dikategorikan sebagai korban oleh pengadilan. Sementara untuk kasus-kasus perdagangan manusia di Ambon, polisi telah mengkonfirmasi dua orang tersangka.

Penanganan para korban human trafficking di Indonesia tidak lah cukup dengan penanganan yang memenuhi kembali hak-hak para korban. Namun, korban juga memerlukan

pembekalan untuk dapat memulai kehidupan baru mereka yang lebih baik agar tidak kembali terjebak dengan permasalahan yang telah mereka lalui. Selain untuk memulihkan traumatic para korban, IOM juga mencoba kembali membangun kepercayaan dan skill para korban human trafficking. IOM juga telah menyediakan bantuan teknis dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas baik mitra pemerintah maupun non-pemerintah dalam mengidentifikasi dan membantu para korban dengan mengikuti pendekatan yang sensitive gender dan anak serta berbasis hak asasi manusia.

